

IMPLEMENTASI SDGs TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

Puspa Indah Danilia, Mugi Setianingsih

puspaindah@gmail.com, mugisetia10@gmail.com

Prodi Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan keikutsertaannya dalam masyarakat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Dalam pandangan ekonomi politik Islam, kesinambungan antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Isu mengenai kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi setiap negara, termasuk juga Indonesia. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan metode studi kepustakaan yang berkaitan dengan kajian teori dan referensi lain yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini dinyatakan bahwa isu pengentasan kemiskinan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk turut menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah pun memberikan beberapa program pengentasan kemiskinan seperti program keluarga harapan (PKH), program kartu keluarga sejahtera, program kartu Indonesia sehat (KIS), dan program kartu Indonesia pintar (KIP). Program tersebut telah banyak membantu masyarakat dan diharapkan program ini akan tetap berlanjut dan ditingkatkan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program pengentasan kemiskinaan, Strategi pengentasan kemiskinan.

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional problem because it is related to the inability to access economically, politically, socio-culturally, and its participation in society. Various existing policies and programs are felt to be ineffective in reducing the number of people living below the poverty line. This can be seen from the tendency to increase the number of poor people from time to time. In the view of Islamic political economy, continuity between social justice and distribution of justice must be maintained so that individuals with high morals are needed. The issue of poverty remains an important issue for every country, including Indonesia. This research method is using qualitative methods with this type of research using library research methods related to theoretical studies and other references related to poverty alleviation. The results of this study stated that the issue of poverty alleviation is still an issue that needs to be considered by the government and the need for support from various parties to help reduce poverty. The government also provides several poverty alleviation programs

such as the Family Hope Program (PKH), the Prosperous Family Card Program, the Healthy Indonesia Card Program (KIS), and the Smart Indonesia Card Program (KIP). The program has helped the community a lot and it is hoped that this program will continue and be improved.

Keywords: *Poverty, poverty alleviation programs, poverty alleviation strategies.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks adalah dalam arti luas, tidak hanya menyangkut aspek finansial, melainkan meliputi semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas (Aziz, et al, 2023). Berdasarkan konsepsi tersebut, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumberdaya yang dimiliki melalui penggunaan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*) (Huraerah, A. 2013).

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003).

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dialami oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Setiap negara pasti akan berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Kondisi di negara berkembang, termasuk juga Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga diiringi permasalahan sosial, seperti meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Aziz & Nur'aisah, 2021). PBB sebagai organisasi dunia yang mencanangkan program SDGs pada 21 Oktober 2015 yang mana akan berakhir pada tahun 2030. SDGs sendiri merupakan program lanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*) yang pada saat itu memiliki 8 poin penting. Setelah masa berakhirnya MDGs kemudian digantikan dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang didalamnya terdapat 17 poin-poin penting dalam kehidupan manusia. Poin pertama dari SDG's yaitu *no poverty* (tanpa kemiskinan) yang akan dibahas pada artikel ini. Tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi harus diakhiri dengan memberantas kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Hal ini merupakan tantangan global terbesar dan persyaratan yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Target SDGs yang terkait kemiskinan antara lain bertujuan mengakhiri kemiskinan ekstrem bagi semua orang di manapun mereka berada. Pada tahun 2030 setidaknya mengurangi separuh proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak segala usia yang hidup dalam kemiskinan, serta

menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang berlaku untuk semua orang, termasuk yang miskin dan rentan (Aziz, 2021).

No properti (tanpa kemiskinan) pada poin pertama SDG's menunjukkan bahwa PBB serius untuk mengurangi angka kemiskinan. Indonesia sendiri yang ikut bergabung dalam program ini, turut melaksanakan tugas ini (Bakhri, et al, 2023). Kemiskinan menurut Suparlan (2004:315) sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin. Lain hal dengan Ritonga (2003:1) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif (Bakhri, et al, 2021). Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qardhawi menjelaskan bahwa pandangan Islam tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun *Ahl al-Dzimmah* (warga negara non-muslim) menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang (tidak bertempat tinggal), dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendunginya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya. Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketenteraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat (Dharmayanti & Aziz, 2024).

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan yang akan dijawab dalam makalah ini adalah mengenai kemiskinan, bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan, peranan pendidikan dalam mengatasi kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam, dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini untuk mengetahui pembahasan mengenai kemiskinan, mengetahui pandangan Islam terhadap kemiskinan, mengetahui peranan pendidikan dalam mengatasi kemiskinan, mengetahui strategi pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam, dan mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

PEMBAHASAN

1. KEMISKINAN

Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan”. Tidak jauh berbeda dengan definisi World Bank, UNDP juga mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonomi. Namun, kemiskinan juga dipandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan atau air minum yang bersih, atau untuk mempengaruhi proses politik dan faktor lainnya yang penting bagi manusia. Dengan kata lain, UNDP memandang kemiskinan sebagai suatu masalah multidimensi yaitu tidak hanya terbatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Adapun definisi kemiskinan yang banyak digunakan di Indonesia terutama dalam pengukuran kemiskinan secara nasional adalah definisi yang dikembangkan oleh BPS. Definisi kemiskinan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/cap/hari) maupun kebutuhan dasar bukan makanan. Sebelumnya, beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut :

- a) Menurut United Nations, komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
- b) Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri atas (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

- c) Menurut Ganguli dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
- d) Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan. e)
- e) Menurut Esmara H (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
- f) Menurut BPS, komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Adapun jenis pangan yang diperhitungkan sebagai kebutuhan dasar adalah padi-padian dan hasil-hasilnya, ubi-ubian dan hasil-hasilnya, ikan dan hasil-hasil ikan lainnya, daging, telur, susu dan hasil dari susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, konsumsi lainnya, makanan yang sudah jadi, minuman yang mengandung alkohol, tembakau, dan sirih. Sedangkan jenis kebutuhan dasar bukan pangan adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air; barang-barang dan jasa; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang-barang yang tahan lama; keperluan pesta dan upacara.

Secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonominya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapitanya dibawah garis kemiskinan (Fatmasari, et al, 2022).

Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam waktu sebulan, baik kebutuhan makanan ataupun non-makanan (Fatmawati, et al, 2022).

Garis kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan Non-makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dll). Sedangkan garis kemiskinan non-makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan diluar dari makanan, yang berupa kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan.



Sumber : BPS

Angka kemiskinan di Indonesia sendiri masih cukup tinggi (Haerisma, et al, 2023) Berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 %, menurun 0,43 % poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 % poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 %, turun menjadi 7,60 % pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 %, turun menjadi 12,53 % pada September 2021. Jika dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin September 2021 perkotaan turun sebanyak 0,32 juta orang (dari 12,18 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,86 juta orang pada September 2021).

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,73 juta orang (dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,64 juta orang pada September 2021). Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp360.007,- (74,05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp126.161,- (25,95 persen). Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.187.756,-/rumah tangga miskin/bulan.

Sebagai bagian dari anggota PBB, Indonesia juga tentunya berkomitmen untuk mengatasi persoalan seiring dengan deklarasi SDG's. Yang artinya bahwa Indonesia juga dituntut untuk mewujudkan target-target yang ditetapkan dalam deklarasi PBB tersebut (Ishartono & Santoso, 2016).

2. PENYEBAB KEMISKINAN

Apabila dipandang dari sisi ekonomi, Sharp (1996) dalam Kuncoro menyatakan penyebab kemiskinan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu :

- a) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang;
- b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia;
- c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Sementara menurut Ginandjar, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan diantaranya : “rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan kondisi keterisolasian”. Dalam laporan yang dikeluarkan dari World Bank diketahui ada lima faktor yang dianggap dapat memengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu ; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis(Harjadi, et al, 2021).

3. PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEMISKINAN

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral (Harjadi, et al, 2023). Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau ada yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural) (Layaman, et al, 2021).

Kemiskinan adalah asal kata dari “miskin” dengan awalan ke dan akhiran an yang menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai persamaan arti dengan “kefakiran” yang berasal dari asal kata “fakir” dengan awalan ke dan akhiran an. Dua kata tersebut seringkali juga disebutkan secara bergandengan, yakni kata “fakir miskin” dengan pengertian orang yang sangat kekurangan. Al-Qur’an memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu faqir, miskin, al-sail, dan al-mahrum, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat Al-Qur’an.

Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam pengertian dari fakir. Pertama, fakir dalam artian orang yang memerlukan kebutuhan hidup primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. Kedua, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Ketiga, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk

karena dapat mendorong orang itu kepada kekafiran. Keempat, fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh petunjuk dan bimbingan Tuhan, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong. Lebih lanjut, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa fakir miskin disebut secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw al'ataf* (kata sambung), sebagaimana dijumpai dalam QS. At-Taubah ayat 60, yang menunjukkan bahwa miskin adalah bagian dari fakir, atau orang miskin itu pada hakikatnya adalah orang fakir juga, tetapi ia memiliki ciri-ciri yang khusus. Sementara itu, An-Nabhani mengkategorikan yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjanya sebagai orang fakir. Sedangkan orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang) sekaligus tak punya penghasilan.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat (Jaelani, et al, 2021). Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka kemiskinan ini akan membuat lupa adanya Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama.

Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut. Kesemuanya ini mampu meniadai agamanya dan juga menimbulkan adanya ketidakridhaan atas takdir yang telah ditetapkan yang akhirnya tanpa sadar akan membuatnya mencela rezeki yang telah datang padanya. Walaupun ini semua belum termasuk ke dalam kekafiran, namun sudah merupakan langkah untuk mencapai kekafiran itu sendiri. Dari penjelasan di atas, isu kemiskinan ini tidak bisa dilepaskan dari konsep pemenuhan kebutuhan minimal. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materiil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah (Aprianto, N. E. K. ; 2018).

4. PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN

Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan merupakan kajian dari para ahli ekonomi seperti Amartya Sen dan Jeffrey Sachs. Mengapa kemiskinan masih terus berlarut di banyak negara berkembang terutama di Indonesia? Menurut Amartya Sen hal ini berkaitan dengan kemerdekaan yang dibatasi. Kemerdekaan individu yang terpasung karena sistem politik menyebabkan rakyat banyak tidak dapat menyuarkan penderitaannya (Ustama, Dicky Djatnika : 2009).

Kaitan antara pendidikan dengan pengentasan kemiskinan, disebutkan oleh Jeffrey Sachs di dalam bukunya *The End of Proverty* salah satu mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005:245-265). Filosofis Amartya Sen, paham libertarianisme Nosick dan Jeffrey Sachs mengemukakan enam paket penuntasan kemiskinan, yaitu :

- a) Kapital manusia (*human capital*) terutama dalam kesehatan, gizi, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- b) Kapital bisnis (*business capital*), sarana-sarana yang diperlukan di dalam transportasi untuk pertanian, industri dan servis.
- c) Infrastruktur, yang meliputi jalan, tenaga listrik, air minum, Sanitasi, dsb.
- d) Kapital alamiah (*natural capital*) berupa tanah pertanian, biodiversitas.
- e) Kapital lembaga-lembaga publik seperti hukum dagang, hukum peradilan, pelayanan pemerintah.
- f) Kapital ilmu pengetahuan (*knowledge capital*) berupa *know how* ilmu dan teknologi yang meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan natural capital.

Pendekatan ekonomis ini melihat masalah pendidikan sebagai sarana untuk peningkatan produktivitas (Nasir, et al, 2022). Dua hal yang perlu dicatat di dalam pemikiran Amartya Sen dan Jeffrey Sachs. Pertama ialah pentingnya kemerdekaan dalam pengembangan pribadi manusia. Proses pendidikan yang memenjarakan kemerdekaan pribadi atau tidak mengembangkan kemampuan seseorang tentunya tidak dapat diharapkan untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan (Wadud & Layaman, 2023).

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dengan demikian pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Wartoyo & Haerisma, 2022). Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang memadai bagi rakyatnya minimal kewajiban 12 tahun belajar. Bahkan Deklarasi HAM PBB 1948 menyebut pendidikan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh setiap negara. Karena itu penyediaan akses pada pendidikan, khususnya pendidikan dasar sudah menjadi komitmen dikalangan komunitas internasional sebagaimana tercemin didalam World Summit for Sosial Development di Kopenhagen tahun 1995 dan World Education Forum di Dakar Tahun 2000 (Ustama, Dicky Djatnika: 2009).

5. STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Strategi pengentasan kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program

pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja (Wibisono, 2010), yaitu :

Pertama Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muara'ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan (Wartoyo, et al, 2022).

Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor bud-geting*). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu, disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayarkan utang, memberi pinjaman tanpa bunga, dan pemberian beasiswa bagi yang belajar agama (Yusuf, et al, 2021).

Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.

Keempat, Islam mendorong penyediaan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Dalam bidang pendidikan, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan bidang kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Yasin, et al, 2023).

Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (hal yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (sikap serakah); Kedua,

kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya; Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil; Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi disatu tangan. (Cantika, S.B. 2013).

6. STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH

Pemerintah sebagai pelaksana amanat kedaulatan rakyat tentu memiliki tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana ditegaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Dalam upaya mengatasi kemiskinan tersebut pemerintah telah merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan berbagai program. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan masalah kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Pada saat terjadinya krisis ekonomi yang kemudian berlanjut menjadi krisis multidimensional (Huraerah, A. 2013).

Pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah pada masa itu sebenarnya telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebagai dasar hukum utama dalam bidang peraturan perundang-undangan di Indonesia) Pasal 34 dan Pasal 27 ayat (2). Pasal 34 berisi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara." Dan Pasal 27 ayat (2) berisi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang (Barlinti, Y. S. ; 2007).

Upaya pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan secara integratif telah dilakukan sejak tahun 1995, yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (Ishartono & Santoso, 2016).

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh pemerintah :

1. Program PKH : perlindungan kepada masyarakat miskin dan efek pengentasan kemiskinan.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program PKH ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negaranegara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun tujuan dari PKH untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri merupakan harapan jangka panjang yang ingin dicapai. Hal ini tidak berarti bahwa tujuan jangka panjang tersebut sia-sia, namun tentu PKH tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai target tersebut. Perlu ada program-program pengentasan kemiskinan lainnya yang betul-betul bersifat memberdayakan agar kondisi keberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya.

Proses dari Program Keluarga Harapan tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal (Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017).

2. Pelaksanaan program kartu keluarga sejahtera

Membahas tentang upaya penanggulangan kemiskinan memang erat kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, maka dari itu diperlukan beberapa langkah untuk mewujudkannya. Dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin semestinya menerapkan strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja (*employment oriented strategy*), strategi yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan (*poverty oriented strategy*), dan strategi yang berorientasi pada pemenuhan keutuhan dasar (*basic needs oriented strategy*).

Melalui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakatnya salah satunya yang bisa kita lihat adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera yang telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan kartu penandang bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kurang mampu. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bansos PKH dan BPNT.

Dampak Kartu Keluarga Sejahtera sangat dirasakan terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tidak menentu, seperti buruh bangunan dan petani yang mengalami gagal panen. Bahkan ditengah pandemi pendapatan masyarakat juga terganggu, sehingga dengan adanya program ini mereka terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Sasaran program kartu keluarga sejahtera adalah kelompok masyarakat rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, orang terlantar, komunitas adat terpencil, tuna sosial, korban bencana.

Bantuan yang didapatkan oleh penerima Kartu Keluarga Sejahtera adalah, beras 10 kilogram, telur 1 rak, ikan kaleng dan abon. Bahan pokok ini diperoleh melalui kartu elektronik (e-money) yang berisi 200.000 rupiah. Penyaluran melalui kartu elektronik diharapkan dapat transparan sehingga bantuan dapat sampai ditangan masyarakat dengan tepat sasaran.

3. Program Indonesia Sehat melalui kartu indonesia sehat (KIS)

KIS merupakan terobosan dari program peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kartu ini bertujuan meringankan beban masyarakat miskin dalam mengurus masalah kesehatandan menjamin kesehatan bagi semua warga Negara Indonesia.

Program KIS muncul sebagai bentuk penyempurnaan program BPJS kesehatan masyarakat khususnya peserta penerima bantuan iuran (PBI) Kis dikeluarkan untuk merekap seluruh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga dengan diterapkannya program Kis ini diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

4. Program Indonesia Pintar melalui kartu indonesia pintar (KIP)

Program Indonesia Pintar melalui kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program bantuan pemberian tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin : pemilik kartu KKS, PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam.

Tujuan program: Menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah kembali. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, dan lain-lain, biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya. Mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Penerima Manfaat: Anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan, baik di satuan pendidikan swasta maupun negeri, (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seiring dengan diberlakukannya KIP sejak tahun 2015, penerima manfaat program ini juga diperluas untuk siswa/santri pada pendidikan keagamaan dan siswa yang tidak bersekolah untuk dapat memasuki sistem pendidikan. Selain itu penerima manfaat program ini juga diperluas juga untuk masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C). Manfaat dari program ini yaitu Anak/siswa dari keluarga kurang mampu dapat tetap mengakses pelayanan pendidikan terutama untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.

Kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan. Diharapkan pemerintah tidak berhenti mengeluarkan kebijakan bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan bantuan sosial dari pemerintah diharapkan dikelola dengan baik secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatur berjalannya program bantuan sosial. Agar bantuan tersebut dapat sampai kepada masyarakat miskin tanpa dikurangi sedikitpun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Setiawan, H. H. (2017).

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia berjalan cukup baik. Hal ini ditandai oleh upaya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian merumuskan program-program pengentasan kemiskinan.

Kita semua tahu bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dialami oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Setiap negara pasti akan berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Melalui SDGs, pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program-program yang digagasnya, seperti program PKH, program kartu keluarga sejahtera, program kartu Indonesia sehat, serta program kartu Indonesia pintar. Sudah banyak manfaat yang didapat dari program-program tersebut, dan diharapkan program ini akan terus berlanjut dan ditingkatkan.

Dalam perspektif Islam, Islam memandang masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer tersebut berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Strategi pengentasan kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja yaitu : Pertama Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*). Islam mencapai *pro-poor growth* melalui dua jalur utama yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak (*pro-poor budgeting*). Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Keempat, Islam mendorong penyediaan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public services*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. 2001. *Ekonomi Pembangunan*. UII Press. Yogyakarta.
- Ansori, M.D. *Sustainable development goals (sdgs) dan faktor-faktor kemiskinan di Indonesia*.
- Aprianto, N. E. K. (2018). *Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam*.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.

- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwo, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāsid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bakhri, S., Nurbaiti, F., & Yusuf, A. A. (2023). The Most Influential Factors On Stock Prices In The JII Index. *Jurnal Manajemen*, 27(3), 612-631.
- Barlinti, Y. S. (2007). *Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Budihardjo*. 2007. "Kemiskinan dalam Perspektif al-Qur'an", Hermeneia: Jurnal Cantika, S. B. (2013). *Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif*
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410-1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Diah Tri Hermawati (2017) tentang "Analisis Pelaksanaan Program
- Djumiarti, T. (2010). *Strategi Pengentasan Kemiskinan: Potret Keberhasilan*
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.
- Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Huraerah, A. (2013). *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1-12.
- Indonesia*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 12(1), 3-13.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan*. Share: Social Work Journal, 6(2), 159.
- Islam*. Journal of Innovation in Business and Economics, 4(2), 101-114.
- Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).

- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart City and Halal Tourism during the Covid-19 Pandemic in Indonesia/Cidade Inteligente e Turismo Halal durante a Pandemia Covid-19 na Indonésia. *Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 2.
- Kartu Keluarga Sejahtera. *PILAR*, 11(2), 1-14.
- Kementerian Kesejahteraan Rakyat. (2004). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 73-96.
- Kemiskinan. Jakarta: Tim Koordinasi Persiapan Penanggulangan Kemiskinan.
- Kemiskinan. *Lex Journalica*, 4(3), 17983.
- Kesejahteraan Sosial*. *Sosio Informa*, 3(3).
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.
- Litbang Pertanian, 25 (4) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian: Bogor.
- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program*
- Muhtar, M., & Noviana, I. (2016). *Potensi Modal Sosial Pada Kelompok Usaha Bersama Program Penanggulangan Kemiskinan*. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). *Analisis Kebijakan Pengentasan*
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- Nazara, Suahasil. 2007. *Pengentasan Kemiskinan: Pilihan Kebijakan dan program yang Realistis*. Dalam *Warta Demografi* tahun ke 37. No. 4 Tahun 2007. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Pembangunan*. *DIALOGUE*, 2(3), 884-897.
- Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2017*. (Online). Vol. 18
- Purwanto SA, Sumartono, Makmur M. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setiawan, H. H. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat*
- Soleh, A. (2014). *Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia*. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Soleh, Ahmad. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pembangunan Ekonomi Antar Region Di Indonesia Tahun 2001-2010*. *Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)* Volume:04.No.03.

- Sudaryanto, T. dan Rusastra, I.W. 2006. *Kebijakan Strategis Usaha Pertanian dalam Rangka Peningkatan produksi dan Pengentasan Kemiskinan*. Dalam Jurnal Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 88-92.
- Susanti et al. 2007. *Indikator-Indikator Makroekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ustama, D. D. (2009). *Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan*. Jurnal Wadud, A. M. A., & Layaman. (2023). The Impact of Islamic Branding on Customer Loyalty with Customer Satisfaction as an Intervening Variable. In *Islamic Sustainable Finance, Law and Innovation: Opportunities and Challenges* (pp. 95-104). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Wartoyo, Kholis, N., Arifin, A., & Syam, N. (2022). The Contribution of Mosque-Based Sharia Cooperatives to Community Well-Being Amidst the COVID-19 Pandemic. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(1), 21-45.
- Wartoyo, W., & Haerisma, A. S. (2022). Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 18(1), 110-139.
- Widodo, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2011). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Dinamika ekonomi pembangunan, 1(1), 25-42.
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).
- YUSUF, A. A., SANTI, N., & RISMAYA, E. (2021). The Efficiency of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 239-247.